

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

Nomor: 762/PSDKP.2/TU.140/IV/2023

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Hal : Laporan Kinerja Periode Triwulan I 2023 Direktorat POA
Tanggal : 17 April 2023

Sehubungan dengan telah dilakukan pengukuran kinerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Ditjen. PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I 2023 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.



Pung Nugroho Saksono

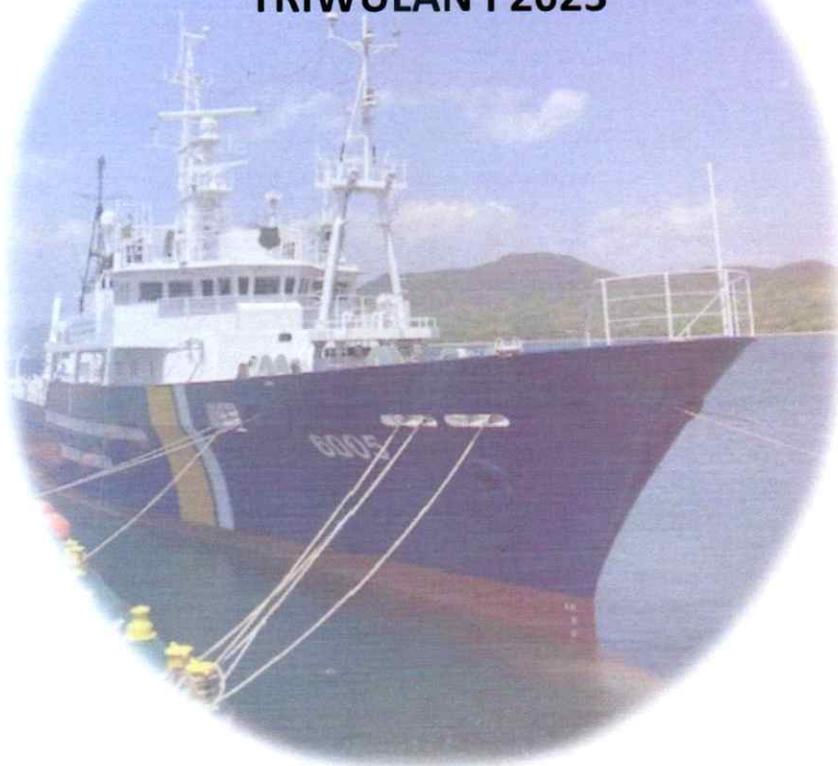
Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

TRIWULAN I 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

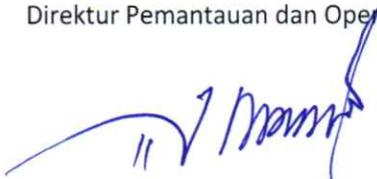
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2023.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : ⁽¹⁾ Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; ⁽²⁾ Operasional Pusat Pengendalian; ⁽³⁾ Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan ⁽⁴⁾ Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Triwulan I 2023 kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah berhasil melakukan beberapa kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2023. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 10 April 2023
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Tahun 2023

1. Teguh Wibowo, S.T
2. Ema Velayati, S.St.Pi
3. Husain, S.Kom

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2023

1. Ikrom Bungsu. S.Pi
2. Nova Roy Yohana, A.Md, S.Sos
3. Ridwan Nurzaha, S.Si
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
5. Bilmantasya Al Fattha, ST
6. Noval Reza Jaya, A.Md

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Maksud dan Tujuan	11
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	14
Sistematika Penyajian	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	17
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	17
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	19
Perjanjian Kinerja Direktorat POA	19
Pengukuran Capaian Kinerja	22

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	24
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	27
Sasaran Kegiatan 1	27
Sasaran Kegiatan 2	28
Sasaran Kegiatan 3	32
Sasaran Kegiatan 4	38
Sasaran Kegiatan 5	45
Akuntabilitas Keuangan	60

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan I 2023	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023	20
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023.....	22
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan I 2023	24
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan I 2023.....	27
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Triwulan I 2023	28
Tabel 7. Rincian capaian per Indikator	29
Tabel 8. Indikasi Kapal Perikanan	29
Tabel 9. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi.....	30
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan I 2023	32
Tabel 11. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode III-B 2023	33
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan I 2023	36
Tabel 13. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Triwulan I 2023	37
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Tahun 2023.....	39
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan I 2023	40
Tabel 16. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	41
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan I 2023	46
Tabel 18. Perbandingan Hasil IKM	47
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan I 2023	47
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan I 2023	49
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan I 2023	50
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan I 2023	51
Tabel 23. Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan I 2023.....	52
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan I 2023.....	52
Tabel 25. Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Triwulan I 2023.....	53
Tabel 26. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan I 2023.....	54
Tabel 27. Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan I 2023.....	54
Tabel 28. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan I 2023.....	56
Tabel 29. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan I 2023.....	57
Tabel 30. Tabel Capaian Nilai IKU MP Ditjen PSDKP Triwulan I 2023.....	58
Tabel 31. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan I 2023.....	59
Tabel 32. Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan I 2023.....	59
Tabel 38. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Tahun 2023.....	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14
--	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK) dengan target pencapaian IKU/IK periode Triwulan I 2023 sebanyak 8 IKU/IK telah memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan I 2023 mencapai 110,29% mengalami penurunan sebesar 0,03% dari capaian triwulan tahun I 2022 sebesar 110,32%. Hal ini dikarenakan ada penambahan IKU yang semula 18 menjadi 19 pada triwulan I 2023.

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA Tahun 2023 telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan yang tertuang dalam DIPA Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp444.055.581.000 (empat ratus empat puluh empat miliar lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan I Tahun 2023 sebesar **Rp 44,849,999,394 (empat puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)** atau sebesar **10,10%** dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dari periode Triwulan I 2022 (**Rp 57,745,848,503**), kinerja penyerapan anggaran tersebut sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2023.

Direktorat POA telah merealisasikan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan prinsip *budget follow* program secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode Tahun 2023 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan I 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	80	-	-
2	Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	20	25	125
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	98,53	106
		4	Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	97,32	111
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	-	-
		6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	93,75	117
		8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%	
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78	-	-
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	-	-
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	-	-
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	133
		14	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99,4	-	-
		15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	-	-
		16	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	-	-
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92	100	109
		18	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
		19	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA						110,29%

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2023

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA yang menginformasikan capaian kinerja selama Triwulan I 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan I 2023 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020-2024

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin kompleks dan beraneka ragam jenisnya serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan IUU fishing. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2015-2020 yaitu sebanyak 707 kapal terdiri dari kapal kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Semakin kompleksnya ancaman pelanggaran di laut dibidang kelautan dan perikanan tentunya memerlukan perubahan dalam pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, artificial intelligent (AI), big data serta Internet of Thing (IoT).

Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 telah menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan **penangkapan ikan terukur** merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis output control (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (*while fishing*) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

ILLEGAL FISHING MASIH MARAK

Situasi pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing*. Hal ini terbukti dengan masih tertangkapnya kapal-kapal pelaku *illegal fishing* oleh

Kapal Pengawas Perikanan. Tercatat sebanyak 18 Kapal ikan asing tertangkap oleh Kapal Pengawas dan sebanyak 79 kapal ikan Indonesia tertangkap oleh Kapal Pengawas sampai dengan bulan Desember 2022.

Eskalasi ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara juga terus terjadi. Hal ini tentunya harus menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah Indonesia untuk tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

PENGUATAN ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan *Exchange of Notes* (ENs) tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu "Hakurei Maru" dan "Shirahagi Maru". Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan.

Sebelum kedua kapal diserahkan ke KKP di Jakarta, Pemerintah Jepang melakukan penyempurnaan dan perbaikan kapal di Jepang dengan alokasi anggaran JPY 2,2 Miliar. Saat ini kedua kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan di Galangan kapal Jepang dan dijadwalkan pengiriman kapal dari Jepang untuk diserahkan di Jakarta pada Tahun 2023.

Sebanyak 2unit Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

SINERGITAS OPERASI BERSAMA

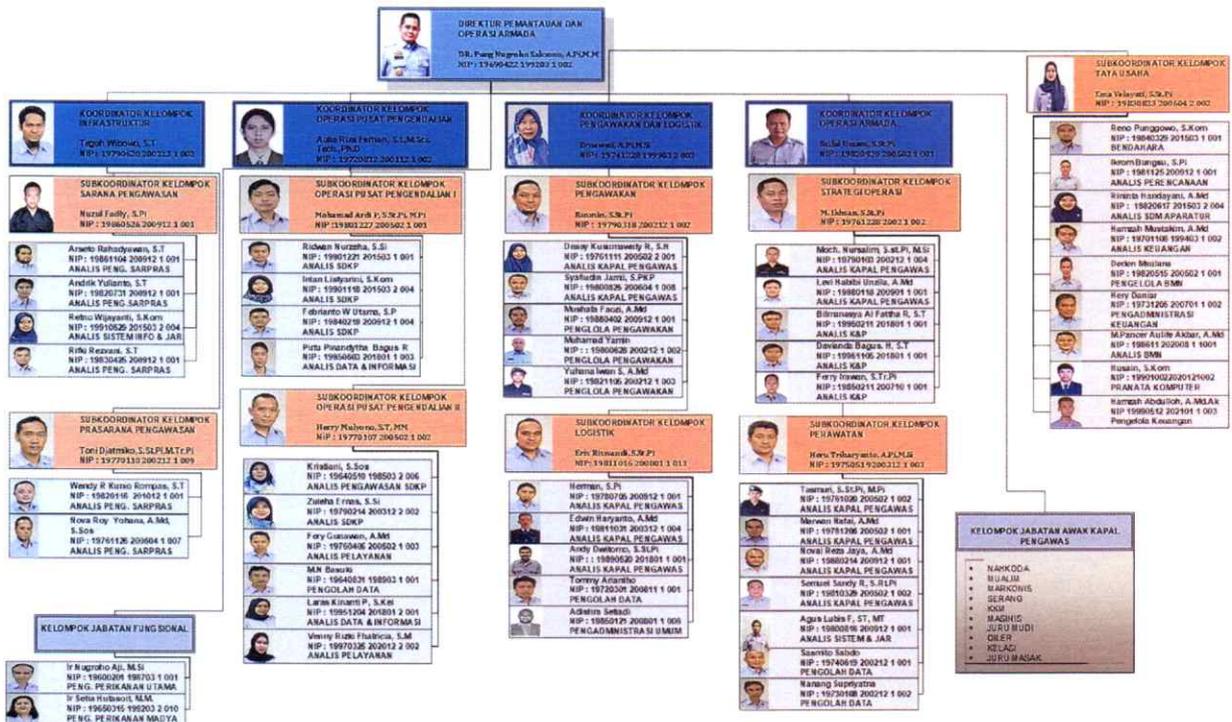
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut

seperti: *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/ Penyelundupan manusia dan *boat people* (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan besar bila bersinergi.

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

1. Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2023 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020-2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Triwulan I 2023 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2023.

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa rincian output kegiatan sebagai berikut:

1. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional;
2. Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat;
3. Kapal Pengawas;
4. Operasi Pesawat Patroli;
5. Operasi Kapal Pengawas;
6. Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau;
7. Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau;
8. NSPK Pemantauan dan Operasi Armada;
9. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan;
10. Layanan Dukungan Manajerial Perkantoran.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdiri atas 5 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	SATUAN
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	80	%
2	Terselenggaranya sistem pemantauan kapal perikanan	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80	Indeks
3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	Indeks
		4	Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	Indeks
		5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	%
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	%
		7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	Indeks
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	%
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100	%
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78	Indeks

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	%
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	Nilai
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	%
		14	Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99,4	%
		15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	Nilai
		16	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	Inovasi
		17	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92	%
		18	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5	%
		19	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5	%

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA triwulan I 2023 ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.750.000.000
2	NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	225.000.000
3	Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	500.000.000
4	Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	140.000.000
5	Operasi Kapal Pengawas	189.658.206.000
6	Operasi Pesawat Patroli	41.250.000.000
7	Kapal Pengawas	172.840.000.000
8	Speedboat Pengawas	8.919.158.000
9	Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	31.273.330.000
10	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5.419.045.000
Anggaran Direktorat POA 2023		444.055.581.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2023

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan I 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 110,29%** dengan indikator NPSS berwarna **HIJAU**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan I 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TRIWULAN	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	80	-	-
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	20	25	125
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	98,53	106
		4	Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	97,32	111
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	-	-
		6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	CAPAIAN	%	
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	93,75	117
		8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78	-	-
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	-	-
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	-	-
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen	75	100	133

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	CAPAIAN	%
		tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)			
		14 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99,4	-	-
		15 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	-	-
		16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	-	-
		17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92	100	109
		18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-
		19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)

1

INDEKS KUALITAS SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Indeks kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan kualitas supervisi terhadap kegiatan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif.

Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%). Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indek kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

1. Media Publikasi;
2. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) POKMASWAS;
3. Kegiatan penilaian POKMASWAS teladan tingkat Nasional;
4. Pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan POKMASWAS;
5. Supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS;
6. Pemutakhiran basis data POKMASWAS;
7. Monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS.

Rincian capaian IKU 1 Direktorat POA periode Triwulan 1 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	RENSTRA 2024		
				T	R	%
Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS	-	-	-	-	-	-

Indikator baru ini merupakan hasil penyempurnaan dari IKU sebelumnya yaitu “Tingkat Keaktifan Pembinaan Pokmaswas”. Pada Triwulan I 2023 target kinerja IKU Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode selanjutnya dikarenakan untuk IKU ini ditargetkan per semester. Namun Direktorat POA tetap melakukan Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap masing-masing Provinsi berupa koordinasi via online berupa komunikasi via Whatsapp, telepon komunikasi, dan zoom, sementara via offline berupa kunjungan ke dinas ke lokasi pembinaan Pokmaswas atau kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Selama periode triwulan I 2023 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Rencana Kegiatan Pembinaan Pokmaswas Tahun 2023 (Jakarta, 26 Januari 2023);
2. Rapat Pembahasan Rencana Kegiatan Pembinaan Pokmaswas dengan DKP Jawa Barat (Jakarta, 31 Januari 2023);
3. Pencetakan Booklet Pokmaswas (16 Februari 2023);
4. Pencetakan PIN Pokmaswas (16 Februari 2023);
5. Pencetakan Kartu Tanda Anggota Pokmaswas (10 Maret 2023).

Alokasi anggaran Triwulan I 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp140.000.000,- dan sampai dengan Triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp21.349.500,- atau 15,25% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat” diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks).

2

INDEKS PEMENUHAN DATA DAN ANALISIS HASIL PEMANTAUAN UNTUK OPERASI PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi IKU-2 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	20	21,67	108,35	20	25	125	80	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 25 dengan persentase capaian sebesar 125%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 3,33% dari yang sebelumnya sebesar 21,67%. Kenaikan capaian ini disebabkan oleh pemantauan terhadap seluruh indikator sudah dapat terpenuhi. Realisasi untuk indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra karena belum masuk di dalamnya sebagai target.

Rincian capaian per indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian capaian per Indikator

No	Indikator	Bulan			Bobot	TW I
		JAN	FEB	MAR		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	40	10
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	20	5
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	20	5
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	20	5
Indeks						25

Indikator kinerja diatas memiliki rincian sebagai berikut:

1. Indikasi Pelanggaran

Selain dari pemantauan tingkat keaktifan kapal dalam mengaktifkan transmiter, kapal juga dipantau pergerakannya agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama Triwulan I 2023, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 586 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 8. Indikasi Kapal Perikanan

No	Indikasi Pelanggaran	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	Pelabuhan Pangkal/ Muat	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI
1	Januari	153	14	19	22	0	0
2	Februari	132	2	4	19	1	0
3	Maret	151	10	22	35	2	0
	TOTAL	436	26	45	76	3	0

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I 2022, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun sebelumnya maupun Triwulan I 2023.

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada periode triwulan I 2023 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 617 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi

No.	Kawasan Konservasi	Labuh/Dugaan Menangkap		
		Jan	Feb	Mar
1	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BURUWAY, ARGUNI, TELUK ETNA, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	8	3	4
2	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI SULAT, GILI LAWANG, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1
3	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN GILI TANGKONG, GILI NANGGU, GILI SUDAK, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	1	0
4	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT KABUPATEN RAJA AMPAT DI PROVINSI PAPUA BARAT	9	6	10
5	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SAWO-LAHEWA DAN PERAIRAN SEKITARNYA KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	1	0	1
6	KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT BUNGA LAUT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DI PROVINSI SUMATERA BARAT	5	5	1
7	KAWASAN KONSERVASI SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA	0	0	2
8	KKP3K KEPULAUAN DERAWAN DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4	7	4
9	KKP3K PULAU KEI KECIL, PULAU-PULAU DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU	4	0	0

No.	Kawasan Konservasi	Labuh/Dugaan Menangkap		
		Jan	Feb	Mar
10	KKP3K UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG DI PROVINSI JAWA TENGAH	25	10	14
11	SUAKA ALAM PERAIRAN (SAP) KEPULAUAN ARU BAGIAN TENGGARA DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU	169	115	21
12	SUAKA ALAM PERAIRAN (SAP) KEPULAUAN WAIGEO SEBELAH BARAT DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA BARAT	1	0	1
13	TAMAN NASIONAL PERAIRAN (TNP) LAUT SAWU DAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	29	17	16
14	TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) KEPULAUAN ANAMBAS DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	17	24	62
15	TAMAN WISATA PERAIRAN (TWP) KEPULAUAN PADAIDO DAN LAUT SEKITARNYA DI PROVINSI PAPUA	9	6	3
Total Keseluruhan		282	195	140

Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak ada perubahan capaian karena indikator terpenuhi pada setiap bulannya baik di tahun 2022 maupun 2023.

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian sampai dengan bulan Maret 2023 telah melakukan pemantauan terhadap 99 kapal pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Triwulan I 2023 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Pemenuhan analisis data pada Triwulan I 2023 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup dan Data untuk Ops Kapal Pengawas / *Airborne Surveillance*.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp5.419.045.000, dan sampai dengan Triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp381.000.779,- atau 7,03% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif” diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks), (2) Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks).

3

INDEKS KINERJA OPERASI PESAWAT PATROLI

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU-3 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Pesawat Patroli	-	-	-	93	98,53	106	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 98,53 dengan persentase capaian sebesar 106%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak dapat

dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024.

Selama periode operasi Triwulan I 2023 telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 150 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP".

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilaut antara lain:

1. Periode I: Operasi Mandiri.
2. Periode I-A: KP. Orca 03, KP dan Hiu Macan Tutul 02
3. Periode II: Operasi Mandiri.
4. Periode II-A: KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Paus 01, KP. Orca 04, KP. Hiu 02 dan KP. Hiu 05.
5. Periode III-A: KP. Orca 03, KP. HMT 02 dan KP. HIU 15.
6. Periode III-B: Operasi Mandiri.

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 11. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode III-B 2023

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	9 - 10 Januari 2022	2	712	1934.4	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan kegiatan operasi patroli di wilayah WPPNRI 712 laut jawa dengan hasil pemantauan ditemukan 1 (satu) unit kapal perikanan penampung dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
I-A	13 - 24 Januari 2022	11	711, 571, 572, 713, 712	111371.2	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02	• Validasi kepatuhan terhadap 7 unit Kapal Purse Seine, 2 unit Kapal Castnet dan 2 unit Kapal Gillnet dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
						<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas, Gili Trawangan, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Mentawai
II	7-8 & 23-24 Februari 2023	4	712, 713	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
II-A	14 - 26 Februari 2023	10	711, 571, 572, 712, 713, 714	136630.4	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02 KP. PAUS 01 KP. ORCA 04 KP. HIU 02 KP. HIU 05	<ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 15 Februari 2023, pesawat udara Air Surveillance dibayangi oleh US Navy F-18 Hornet selama 20 menit di dalam Landas Kontinen Indonesia. Tindak lanjut dari kejadian ini telah dilaporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti; Peninjauan kembali Kapal Bitumen Tanker Pengangkut Aspal (MV. AASHI) yang kandas di Perairan Nias oleh Direktur Jenderal PSDKP bersama dengan Tim Polsus PPSDK pada tanggal 25 Februari 2023. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 571, 572, 712, 713, dan 714

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
III-A	7 - 18 Maret 2023	10	43,84	111.731,2	KP. ORCA 03, KP. HIU MACAN TUTUL 02, KP. HIU 15	1. Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI 2. Penyampaian posisi Kapal Ikan Asing (KIA) ke Kapal Pengawas 3. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. 4. Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 716, 713, dan 712
III-B	12 - 14 Maret 2023	2	8,7	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
Total Hari Operasi		39	Total Coverage Area (NM²)	361.667,2		

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
- 2) Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan **kelautan** yang berada pada wilayah-wilayah yang beririsan dengan pengawasan **perikanan** sehingga meningkatkan capaian operasi;
- 3) Mengurangi volume *ferry flight* secara signifikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp41.250.000.000,- dan sampai dengan Triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp7.903.865.122,- atau 19,16% dari total pagu.

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-4 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,5	-	-	87,6	97,32	111	89	97,32	109

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 97,32 dengan persentase capaian sebesar 111%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 89 persen, realisasi telah mencapai 97,32 persen melebihi dari target yang ditentukan.

Selama periode Triwulan I 2023 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari operasi mandiri 32 Kapal Pengawas sebanyak 553 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 17 hari operasi.

Adapun hasil operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan oleh Kapal Pengawas ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil operasi PSDKP oleh Kapal Pengawas periode Triwulan I 2023

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	JAM LAYAR	DIPERIKSA			DITANGKAP		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	20	241.11	24	5	29	3	5	8
2	KP. ORCA 02	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KP. ORCA 03	12	208.6	57	0	57	0	1	1
4	KP. ORCA 04	15	158	13	0	13	2	0	2
5	KP. ORCA 05 (HAKUREI MARU)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KP. ORCA 06 (SHIRAHAGI MARU)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KP. HIU MACAN TUTUL 01	17	152	38	0	38	1	0	1
8	KP. HIU MACAN TUTUL 02	29	484.45	87	0	87	1	0	1
9	KP. PAUS 01	35	514.33	115	0	115	4	0	4
10	KP. AKAR BAHAR 01	6	26	0	0	0	0	0	0
11	KP. HIU MACAN 01	20	212.33	63	0	63	0	0	0
12	KP. HIU MACAN 03	13	132.19	27	0	27	1	0	1
13	KP. HIU MACAN 04	10	105.16	22	0	22	1	0	1
14	KP. HIU MACAN 05	15	185.25	29	0	29	2	0	2
15	KP. HIU MACAN 06	17	246	46	0	46	0	0	0
16	KP. HIU 01	26	286.16	57	0	57	0	0	0
17	KP. HIU 02	25	297.4	50	0	50	3	0	3
18	KP. HIU 03	3	26.15	16	0	16	0	0	0
19	KP. HIU 04	20	246.41	52	0	52	0	0	0
20	KP. HIU 05	25	222	54	0	54	4	0	4
21	KP. HIU 06	20	231.75	66	0	66	1	0	1
22	KP. HIU 07	30	348	58	0	58	3	0	3
23	KP. HIU 08	33	331.24	64	5	69	0	1	1
24	KP. HIU 09	14	0	24	0	24	3	0	3

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	JAM LAYAR	DIPERIKSA			DITANGKAP		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
25	KP. HIU 10	20	216.99	38	0	38	0	0	0
26	KP. HIU 11	15	169.24	29	0	29	0	0	0
27	KP. HIU 12	20	196	42	0	42	0	0	0
28	KP. HIU 13	35	373.28	45	0	45	2	0	2
29	KP. HIU 14	10	95.33	40	0	40	0	0	0
30	KP. HIU 15	30	301.7	65	0	65	2	0	2
31	KP. HIU 16	15	163.2	31	0	31	0	0	0
32	KP. HIU 17	3	32.99	7	0	7	0	0	0
JUMLAH TOTAL		553	6203,26	1259	10	1269	33	7	40

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan RPM secara proporsional untuk mengendalikan penggunaan BBM sehingga meningkatkan cakupan wilayah pengawasan dan endurance meningkat;
2. Meminimalisasi pencapaian “upaya pemenuhan variabel target operasi” (khususnya bagi kapal Kelas 1) untuk meningkatkan efisiensi operasi dan cakupan wilayah pengawasan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp189.658.206.000,- dan sampai dengan triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp31.303.666.440,- atau 16,51% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP.

5

PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SARANA PENGAWASAN SDKP KAPAL PENGAWAS KELAS II

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2023 terdapat Pengadaan sebanyak 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan *Multi Years Contract (MYC) Tahun anggaran 2022-2023*. Untuk Progres Pembangunan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) hingga tahun 2022 telah tercapai 10% dan sisa target pembangunan fisik tahun 2023 sebesar 90% target keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 100%. Progress pembangunan merupakan persentase penyelesaian pembangunan konstruksi.

Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II” merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II pada Triwulan I belum dapat dihitung dikarenakan target capaian dihitung di akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk dapat mencapai target tersebut diatas, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi/pengendalian rutin dengan PT. Palindo Marine selaku penyedia, PT. Zatria Awan Consultant sebagai konsultan pengawas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi, Inspektorat Jenderal KKP, tim desain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya untuk membahas progres dan kendala serta solusinya selama pelaksanaan pekerjaan;
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan (galangan) dengan didampingi tim desain BRIN, tim Itjen KKP, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya;
3. PPK memberikan surat instruksi yang diperlukan kepada penyedia dan konsultan pengawas;
4. Melakukan open management dengan melibatkan Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, BPKP, Itjen KKP, LKPP dan pihak terkait lainnya.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp172.840.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp182.069.626,- atau 0,11% dari total pagu.

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2023.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP pada periode Triwulan I 2023 terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perawatan Pencegahan (*Preventive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kerusakan dini (*preventive maintenance*) pada kapal. Perawatan rutin diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
2. Perawatan Prediktif (*Predictive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara memprediksi kerusakan yang akan timbul pada kapal pengawas, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk perawatan kapal pengawas yang bersifat periode. Perawatan prediktif diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
3. Perawatan Darurat (*Breakdown maintenance*) merupakan perawatan yang dilaksanakan dalam rangka menangani/memperbaiki kerusakan yang terjadi diatas kapal akibat kejadian yang tidak terduga (*unpredicted*), kegiatan perbaikan ini sangat penting untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan yang lebih fatal. Perbaikan darurat dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga atau dengan cara swakelola sesuai batas kemampuan teknis yang dimiliki Awak Kapal Pengawas (AKP).

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	100	-	-	100	100	100	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun sebelumnya, realisasi tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut ditargetkan penyelesaian diakhir tahun. Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Penyelesaian

Perawatan Sarana Pengawasan agar seluruh Armada siap beroperasi untuk mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh monitoring kepada tiap UPT dengan mengharuskan melaporkan kondisi armada setiap bulannya agar kegiatan perawatan rutin dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang dibuat.

Selama periode triwulan I 2023 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP, telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan 8unit kapal pengawas di satker Pusat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 16. Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Januari	Februari	Maret
1	KP. Orca 01	Perawatan Rutin		
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembelian Mesin Pengering LG Dryer Max 15 Kg dan Mesin Cuci LG F2515 STGW	Service Perlengkapan Keselamatan PMK
				Service Perlengkapan Keselamatan Liferaft
				Service Gyro Compas
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Instalasi Pendingin AC dan Ganti Valve
2	KP. Orca 02	Perawatan Rutin		
		Service Gyro Compas	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Pipa Preeming Lube ME	Service Perlengkapan Keselamatan Liferaft
		Service Perlengkapan Navigasi Dalam Rangka Kalibrasi Radar Furuno FCR 3000 S-Band	Service Alat Keselamatan PMK	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Blower Ruang Bow Truster
		Service Perlengkapan Navigasi Dalam Rangka Perbaikan Radar Furuno Far 2117 X-Band	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan AC Anjungan	

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Januari	Februari	Maret
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pemasangan Rumah Blower Kiri dan Kanan		
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Bolder Buritan Kanan		
3	KP. Orca 03	Perawatan Rutin		
				Service Perlengkapan Keselamatan Liferaft
		Service Gyro Compas	-	Service Perlengkapan Keselamatan PMK
				Service Perlengkapan Navigasi Dalam Rangka Penggantian Alat Transfer Data Unit
4	KP. Orca 04	Perawatan Rutin		
		Service Gyro Compas	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Pipa Preeming Lube ME	Service Perlengkapan Navigasi Dalam Rangka Penggantian Alat Transfer Data Unit
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan AC Central Merk Aicool	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Cold Storage Merk Aicool	Pembelian 1 Set Kunci Sock 8-32 ml
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Fleksible Exhaust AE Kanan	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penyekrapan Teritip	Pembelian 1 Set Kunci Sock 3/8 - 1 1/4 Inchi

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Januari	Februari	Maret
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Tenda Buritan	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Service Kompresor Selam	
			Pembelian Kacamata Selam	
			Pembelian Senter Merek Amscud	
			Perbaikan RIB Kiri dan Kanan	
5	KP. HMT 01	Perawatan Rutin		
			Pembelian Kunci Moment Jetjo	Service Perlengkapan Keselamatan Liferaft & PMK
			Pembelian AC Panasonic 1 PK dan AC Panasonic 2 PK	Service Gyro Compas
				Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pembelian Vacuum Cleaner Sharp EC-8305
				Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pembelian Mesin Cuci LG F1208N3W 8 KG
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pembelian Fuel Transfer Pump 3970880
6	KP. HMT 02	Perawatan Rutin		
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 42 Meter Pembelian TCL LED	Service Perlengkapan Keselamatan Liferaft & PMK
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 42 Meter	Service Perlengkapan Kapal Pengawas Dalam

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Januari	Februari	Maret
			Dalam Rangka Pembelian Sistem Loud Hiler Standar Horizon VLH 3000	Rangka Perbaikan CCTV
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pembelian Accu N120	Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pembelian AC Split
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Pengadaan MCCB
7	KP. Paus 01	Perawatan Rutin		
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Bulwark Buritan Bagian Kanan	
			Pengadaan Tirai Penutup Kamar dan Koridor	
			Perbaikan Plafon, Lantai dan Walpaper Dinding	
			Perbaikan Meubelair	
8	KP. Akar Bahar 01	Perawatan Rutin		
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Service AC Long Room dan Pantry	Service Perlengkapan Komunikasi Dalam Rangka Pemasangan dan Setting Intalasi Radio Rig
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Pekerjaan Refiber / Penebalan Lambung Buritan dan Perpipaan Jalur Pendingin AC	Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Perbaikan Alternator Mesin Bantu Generator
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Setting Tiang Layar	

No	Nama Kapal	Jenis Perawatan		
		Januari	Februari	Maret
			Service Alat Keselamatan Liferaft & PMK	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Pembelian Radio Rig	
			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 14 Meter Dalam Rangka Perbaikan Mufler Auxilliary Engine	
			Pengadaan Battery Charger dan Power Supply	

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak lepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun repair list masing-masing Kapal Pengawas secara rinci;
- 2) Senantiasa melakukan rapat konsultasi dengan APIP terkait pekerjaan tersebut;
- 3) Menyusun dokumen manajemen resiko kegiatan perawatan;
- 4) Senantiasa melakukan rapat evaluasi kepada pihak galangan atau pelaksana pekerjaan untuk mengetahui progress pekerjaan;
- 5) Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala dan bergantian untuk mempermudah koordinasi dan memperoleh data faktual detail pekerjaan dilapangan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini sebesar Rp 31.273.330.000,- dan sampai dengan Triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp 3.895.930.493,- atau 12,46% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 5

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA, (3) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA, (4) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (5) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (6) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (7) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, (8) Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA, (9)

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, (10) Jumlah Inovasi yang dihasilkan, (11) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, (13) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA.

7

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT),
Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan;
2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan,
Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.
3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan,
Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja pelayanan publik.

Rincian capaian IKU 7 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	80	92,34	115,43	80	93,75	117,19	80	93,75	117,19

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 93,75 dengan persentase capaian sebesar 117,19%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 3,76 dari yang sebelumnya sebesar 88,58 dan pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 1,41 dari yang sebelumnya sebesar 92,34. Kenaikan capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Peningkatan terjadi pada produk layanan Analisis Pergerakan

Kapal Perikanan, kenaikan capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen realisasi ini telah mencapai 117,19 persen, dengan demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra.

Rincian Perbandingan Hasil IKM Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan Hasil IKM

PRODUK LAYANAN	TW I 2022	TW I 2023
Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	92,82	94,05
Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	89,99	93,10
Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	94,21	94,10
Total	277,02	281,25
Rata-rata	92,34	93,75

Selama periode triwulan I 2023 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Standardisasi Pelayanan Publik: Bimbingan Teknis Aplikasi SPKP bagi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP (Bali, 6-7 Februari 2023);
2. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima: Assertive Communication For Service Excellence (Bali, 8-10 Februari 2023);
3. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2023 (Manado, 14 Maret 2023);
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Manado, 15 Maret 2023).

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp2.750.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.028.990.764,- atau 37,42% dari total pagu.

8

PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN NSPK BIDANG PENGAWASAN SDKP LINGKUP DIREKTORAT POA

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I 2023 progress masih dalam tahap penyusunan draft dan proses pengesahan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2023.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Rincian capaian IKU 8 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 belum ada capaian dikarenakan dilakukan pada akhir tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal penyelesaian NSPK di bidang Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp225.000.000,- dan sampai dengan triwulan I 2023 belum ada realisasi.

9

PERSENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RESIKO LINGKUP DIREKTORAT POA

- a. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- b. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

- c. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	100	100	100	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan I 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU baru di Tahun 2023. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA;
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

10

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT POA

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)

- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
 - Pejabat Struktural:
 - DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)
 - Pejabat Fungsional Tertentu:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
 - Pejabat Fungsional Umum/ Staf:
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)

<ul style="list-style-type: none"> • ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin) • ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin) • ASN Staff: (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
--

Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	78	-	-	76	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 78. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023 belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 76 persen belum ada capaian.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

3. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
4. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). Direktorat POA telah melaksanakan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP Tahun 2023 pada Bulan Maret 2023 di Manado dengan peserta sebanyak 46 orang pengguna Layanan SPKP.

Rincian capaian IKU 11 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	76	-	-	77	-	-	80	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA” belum ada capaian dikarenakan IKU tersebut akan dilakukan perhitungan di akhir tahun 2023, bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 belum bisa dibandingkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pelaksanaan Bimtek SPKP di bidang Operasi Pusat Pengendalian;
2. Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi.

Rekonsiliasi Kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkalit pelaporan kinerja.

Rincian capaian IKU 12 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Target dan realisasi IKU-12 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	90	-	-	90	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 90. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

13

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Rincian capaian IKU 13 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 24. Target dan realisasi IKU-13 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	70	70	100	75	100	133	80	100	125

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022 realisasi capaian mengalami peningkatan sebesar 30%, dari target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian dari target yang bertambah

tiap tahunnya dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja.

Namun demikian pada tahun 2023 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga periode Triwulan I 2023 sebesar 75 dengan realisasi 133%. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh arahan dari pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui dari target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses tindak lanjut berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 25. Tabel Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Triwulan I 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	25	25	100	0	0
2	Direktorat POA	1	1	100	0	0
3	Direktorat PPSDK	0	0	0	0	0
4	Direktorat PPSDP	0	0	-	0	0
6	Direktorat PP	0	0	-	0	0

14

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA.

- a. Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023
- b. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:
 1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
 2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
 4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

Rincian capaian IKU 14 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 26. Target dan realisasi IKU-14 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023. Capaian IKU “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 99,4 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Melakukan penilaian mandiri, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

15

NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2022, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- Target nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Rincian capaian IKU 15 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 27. Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” ditargetkan sebesar 21 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023

belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

1. Hasilkan Inovasi Satker (HIU);
Target Inovasi per Satker telah tercantum pada indikator kinerja utama, Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat;
2. Rapat biasanya dimulai dengan peserta yang sedikit dan banyak terlambat, dengan adanya program ini maka rapat pada Dit. POA dimulai dengan sebagian peserta sudah hadir, sehingga arahan dan substansi awal dapat dipahami.
3. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R);
Ruang kerja sebelumnya terkesan berantakan dan tidak teratur, maka dengan adanya program masing-masing meja tiap pegawai telah menjalankan program 5R.
4. Upayakan Data Terkini (UPDATE);
Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
5. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA);
Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif.
6. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT);
Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik.
7. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA);
Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
8. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK);
Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
9. Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP);

Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.

10. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS);
Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
11. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).
Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

16

JUMLAH INOVASI YANG DIHASILKAN

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Rincian capaian IKU 16 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 28. Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Jumlah Inovasi yang dihasilkan	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU tersebut dilakukan perubahan nama pada tahun 2023 yang sebelumnya “Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”. Capaian IKU “Jumlah Inovasi yang dihasilkan” ditargetkan sebesar 1 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya;
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.

17

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf.

Rincian capaian IKU 17 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 29. Target dan realisasi IKU-17 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat POA	86	100	116,28	92	100	109	90	100	111,11

Berdasarkan tabel diatas, bila dibandingkan dengan Triwulan I 2022 capaian realisasi relatif sama dari capaian sebelumnya 100, hal ini dikarenakan target mengalami perubahan selalu meningkat dan target capaian pemenuhan upload bitrix yang semula 3 kali menjadi 6 kali upload. Namun demikian pada Tahun 2023 capaian tetap melampaui dari target yang ditetapkan, sehingga periode Triwulan I 2023 sebesar 100 dengan realisasi 109%. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai

arahan pimpinan setiap waktu. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024, realisasi telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan pada tabel 30 berikut:

Tabel 30. Tabel Capaian Nilai IKU MP Ditjen PSDKP Triwulan I 2023

No	Unit Kerja	TW I	Nilai Akhir
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	97,78%	97,78%
2	Direktorat POA	100%	100%
3	Direktorat PPSDP	100%	100%
4	Direktorat PPSDK	98,98%	98,98%
5	Direktorat PP	100%	100%

18

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Rincian capaian IKU 18 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Target dan realisasi IKU-18 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77,5 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

19

TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DIREKTORAT POA

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Rincian capaian IKU 19 Direktorat POA periode Triwulan I 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan I 2023

INDIKATOR KINERJA	TW I 2022			TW I 2023			RENSTRA 2020-2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77,5 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan I 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Tahun 2023 telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp444.055.581.000 (empat ratus empat puluh empat miliar lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 44,849,999,394** atau **10,10%** dari pagu **Rp444.055.581.000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lebih tinggi, realisasi Triwulan I 2022 sebesar **Rp. 57,745,848,503** hal ini dipengaruhi oleh percepatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat POA seperti melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Tabel 33. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Tahun 2023

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Layanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	2.750.000.000	1.028.990.764	37,42%	1.721.009.236	62,58%
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	225.000.000	-	-	225.000.000	100%
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang dipantau	500.000.000	133.126.670	26,63%	366.873.330	73,37%
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang di pantau	140.000.000	21.349.500	15,25%	118.650.500	84,75%
Operasi Kapal Pengawas	189.658.206.000	31.303.666.440	16,51%	158.354.539.560	83,49%
Operasi Pesawat Patroli	41.250.000.000	7.903.865.122	19,16%	33.346.134.878	80,84%
Kapal Pengawas	172.840.000.000	182.069.626	0,11%	172.657.930.374	99,89%

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	31.273.330.000	3.895.930.493	12,46%	27.377.399.507	87,54%
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5.419.045.000	381.000.779	7,03%	5.038.044.221	92,97%
TOTAL	444.055.581.000	44.849.999.394	10,10%	399.205.581.606	89,90%

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memaksimalkan sumber anggaran yang ada untuk mendukung kinerja organisasi. Optimalisasi yang telah dilakukan pada Triwulan I 2023 telah memaksimalkan kinerja operasi melalui matra udara (*airborne surveillance*) yang diintegrasikan dengan armada kapal pengawas. Pesawat patroli udara melakukan pemantauan target kapal-kapal dan wilayah konservasi perairan, selanjutnya data valid yang memuat identitas kapal, foto kapal dan posisi kapal dikirimkan ke pusat komando operasi dan armada kapal pengawas. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan telah memiliki target operasi yang jelas karena sudah divalidasi oleh pesawat patroli udara.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2023

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan I 2023 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Triwulan I 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode Triwulan I 2023 sebesar 110,29%.
3. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja diukur pada triwulan I 2023 yang seluruhnya tercapai sesuai target bahkan melampaui.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
a. Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.	a. Melakukan rapat evaluasi bulanan serta melakukan Monev baik online maupun offline kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA.
b. Melakukan upaya maksimal untuk memastikan tercapainya seluruh target Renstra Diten PSDKP 2020-2024.	b. Melakukan rapat evaluasi triwulanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemenuhan target Renstra PSDKP 2020-2024.